

8. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PASAR MODAL

220

8. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PASAR MODAL

221

Struktur Regulasi/Hukum Pasar Modal Indonesia

Undang Undang di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah di Bidang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal

222

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Mengatur tentang:
 - 1) Regulator di bidang pasar modal, Self Regulatory Organisation, Perusahaan Efek, wakil Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Kustodian Bank, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - 2) Penyelesaian transaksi Efek dan penitipan kolektif;
 - 3) Emiten dan Perusahaan Publik;
 - 4) Pelaporan dan keterbukaan informasi;
 - 5) Pidana di pasar modal
 - 6) Pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Mengatur tentang pembentukan, tujuan, fungsi, tugas dan kewenangan OJK sebagai regulator di industri keuangan Indonesia. Peralihan BapepamLK ke OJK dan Fungsi Pengawasan Perbankan BI ke OJK

Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal

223

- Peraturan Pemerintah di Bidang Pasar Modal:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 sebagaimana diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang **Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal**
PP ini mengatur tentang:
 - Permodalan dan tatacara pendirian Bursa Efek dan pengajuan ijin Bursa Efek;
 - Permodalan dan tatacara pendirian Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - Perijinan Reksa Dana, Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek; Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara **Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal**
Pengaturan regulator dalam menjalankan aktivitas pengawasan Pasar Modal

Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal

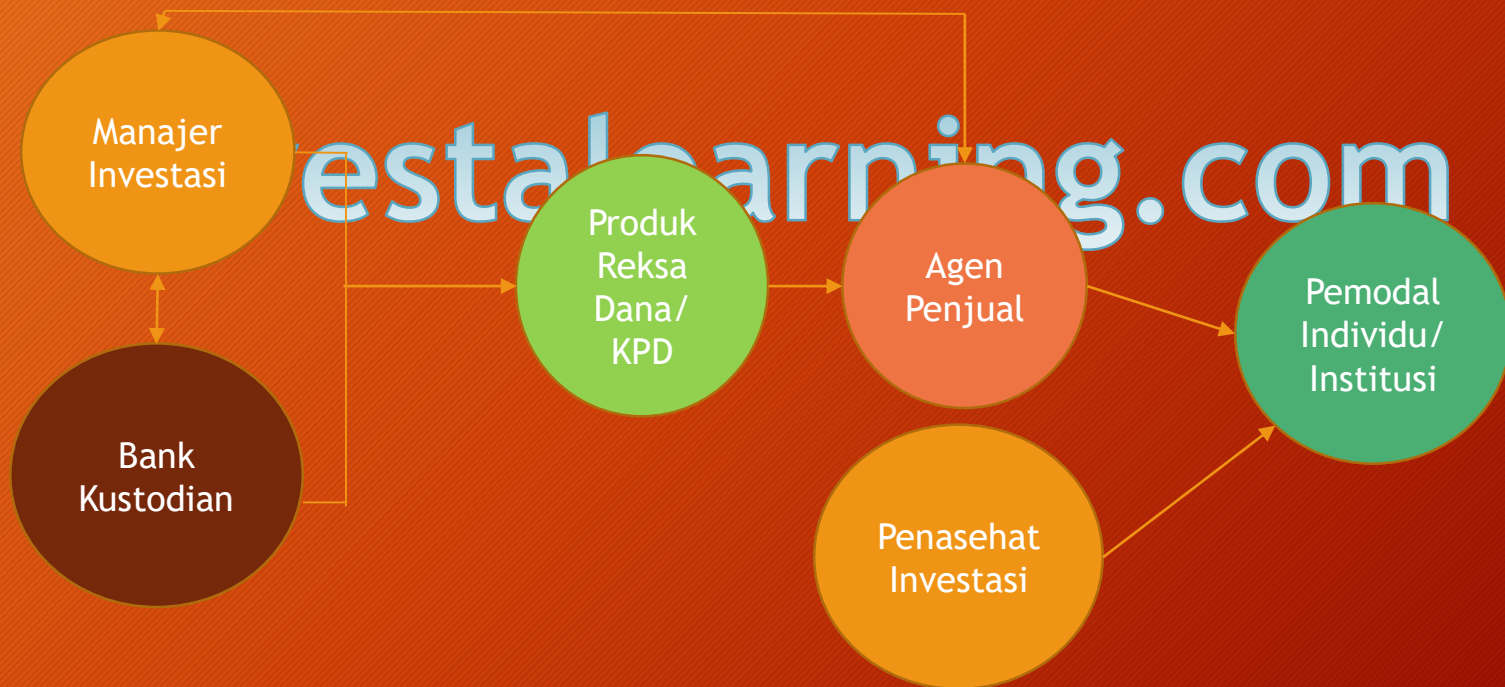
224

- Peraturan Pemerintah di Bidang Pasar Modal:
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Mengatur tentang:
 1. Mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis secara terpadu, efisien dan efektif antar lembaga keuangan dalam rangka menghadapi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
 2. Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya disebut KSSK yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota.

Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal

225

Pihak-pihak Dalam Industri Pengelolaan Investasi



REGULASI YANG BERLAKU DAN MENGATUR SETIAP PIHAK

Peraturan OJK Bidang Pengolahan Investasi 2013 s/d saat ini

226

MANAJER INVESTASI dan SISTEM

1. POJK Nomor 25/POJK.04/2014 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi
2. POJK Nomor 24/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi.
3. POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
4. POJK Nomor 28/POJK.04/2016 Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

AGEN PENJUAL REKSADANA

5. POJK Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Reksa Dana
6. POJK Nomor 50/POJK.04/2015 Tentang Wakil Agen Penjual Reksa Dana

RD PERSEROAN

7. POJK Nomor 39/POJK.04/2016 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
8. POJK Nomor 40/POJK.04/2016 Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
9. POJK Nomor 41/POJK.04/2016 Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Peraturan OJK Bidang Pengolahan Investasi 2013 s/d saat ini

227

Reksa Dana KIK

10. POJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksdana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
11. POJK Nomor 23 /POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
12. POJK Nomor 48 /POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.
13. POJK Nomor 47/POJK.04/2015 Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka
14. POJK Nomor 49/POJK.04/2015 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
15. POJK Nomor 19 /POJK.04/2016 Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
16. POJK Nomor 34/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Target Waktu
17. POJK Nomor 52/POJK.04/2017 Tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan OJK Bidang Pengolahan Investasi 2013 s/d saat ini

228

PENGELOLAAN DANA NASABAH INDIVIDUAL

18. POJK Nomor 21/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual

TAX Amnesty

19. POJK Nomor 26/POJK.04/2016 Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.
20. POJK Nomor 4/POJK.04/2017 Tentang Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PRODUK SYARIAH

21. POJK Nomor 61 /POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.
22. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
23. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Surat Edaran OJK Bidang Pengolahan Investasi 2013 s/d saat ini

229

1. SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face to Face) dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana melalui Pembukaan Rekening Elektronik, serta Tata Cara Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana
2. SEOJK No.16/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Wakil Manajer Investasi
3. SEOJK No. 50/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan terhadap Asosiasi Manajer Investasi.
4. SEOJK No. 1/SEOJK.04/2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksadana.
5. SEOJK Nomor 51/SEOJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Penjualan Efek Reksa Dana di Gerai Penjualan Efek Reksa Dana
6. SEOJK Nomor 49/SEOJK.04/2016 tentang Kriteria Khusus Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak
7. SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2017 Tentang Penyampaian Permohonan Perizinan, Pendaftaran, Pencatatan, Persetujuan, dan Pelaporan secara Elektronik bagi Pelaku di Bidang Pengelolaan Investasi